



**PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENCANA AKSI KINERJA (RAK)

## PENGADILAN AGAMA BONTANG



# bangga  
melayani  
bangsa



### TAHUN 2025

[pa-bontang.go.id](http://pa-bontang.go.id)

[kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

(0548) 23001

0813-5125-6098

[pengadilanagamabontang](https://www.instagram.com/pengadilanagamabontang)

Pengadilan Agama Bontang

Jl. Awang Long No. 69  
Kota Bontang

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	98	98	98
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	97	97	97	97
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	98	98	98
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	92	92	92	92

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu									
1	Menerima pendaftaran perkara gugatan dan permohonan, verzet, permohonan eksekusi, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) baik secara manual maupun secara elektronik dan surat kuasa sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen penyelesaian perkara	Biaya Perkara
2	Mendistribusikan berkas perkara yang telah diterima kepada hakim tunggal dan/atau majelis hakim dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	Biaya Perkara
3	Membuat penetapan hari sidang dan memasukkan jadwal sidang ke SIPP dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	Biaya Perkara
4	Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara dengan tepat waktu baik secara manual maupun secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK	✓	✓	✓	✓	Relaas	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	Biaya Perkara

	KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022								
5	Melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan dan membuat berita acara sidang dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Memperbanyak frekuensi persidangan	Biaya Perkara
6	Memutus perkara dengan tepat waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan SK Dirjen Badilag Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019, tanggal 10 Januari 2019	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Menjaga kualitas putusan peradilan agama	Biaya Perkara
7	Memberitahukan isi putusan dengan tepat waktu sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	Biaya Perkara
8	Melaksanakan minutasi berkas perkara dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan kemampuan manajemen peradilan agama	Biaya Perkara
9	Mengarsipkan berkas perkara, menyusun laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan serta statistik perkara	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatkan tata kelola kearsipan perkara peradilan agama	Biaya Perkara
<b>INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b>									
1	Mengelola dan menjalankan proses perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan memperhatikan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan kemampuan administrasi upaya hukum banding peradilan agama	Biaya Perkara
2	Menyusun putusan yang berkeadilan kepada para pihak dengan melakukan diskusi hukum setiap triwulan kepada para hakim	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan kualitas putusan peradilan agama	-
<b>INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b>									
1	Mengelola dan Menjalankan Proses perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan memperhatikan SK KMA RI Nomor 32/KMA/SK/II/2023	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan kemampuan administrasi upaya hukum kasasi peradilan agama	Biaya perkara
2	Menyusun putusan yang berkeadilan kepada para pihak dengan melakukan diskusi	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan	Peningkatan kualitas putusan peradilan agama	-

	hukum setiap triwulan kepada para hakim						Hukum		
<b>INDIKATOR KINERJA : Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan</b>									
1	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat per semester dengan memperhatikan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017	✓	✓	✓	✓	Hasil Survei	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	-
2	Melakukan tindak lanjut atas hasil survie untuk meningkatkan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan	✓	✓	✓	✓	Hasil Survei	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	90	90	90	90
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	85	85	85	85

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
<b>INDIKATOR KINERJA : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu</b>									
1	Menyerahkan salinan putusan ke para pihak denga tepat waktu dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Memaksimalkan penyerahan salinan putusan kepada para pihak	PNBP
2	Menyiapkan salinan putusan baik manual maupun elektronik untuk diserahkan kepada para pihak	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Memaksimalkan penerimaan Pendapat Negara Bukan Pajak	PNBP
<b>INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</b>									
1	Melaksanakan mediasi baik secara manual maupun secara elektronik terhadap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui keberhasilan mediasi	Biaya Perkara

2	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk memaksimalkan keberhasilan mediasi	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja mediator	-
---	--	---	---	---	---	---------	---------------------------------------	---	---

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
<b>INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b>									
1	Memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014	✓	✓	-	-	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatkan kampanye pembebasan biaya perkara kepada masyarakat tidak mampu	12.000.000 DIPA TA. 2025
2	Memaksimalkan serapan anggaran pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin	✓	✓	-	-	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perencanaan yang baik dalam mengelola anggaran prodeo	12.000.000 DIPA TA. 2025
<b>INDIKATOR KINERJA : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum</b>									
1	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatkan layanan kepada Masyarakat tidak mampu	50.000.000 DIPA TA. 2025

	Memaksimalkan serapan anggaran untuk layanan bantuan hukum bagi masyarakat terpinggirkan	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perencanaan yang baik dalam mengelola anggaran Posbakum	50.000.000 DIPATA. 2025
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				TARGET			
						I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)				96	96	96	96

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
INDIKATOR KINERJA : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)									
1	Memproses secara cepat dan tepat permohonan eksekusi dan interkoneksi sistem	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatkan penguasaan hukum acara eksekusi perkara perdata dan interkoneksi sistem	Biaya Perkara
2	Mengimplementasikan efektivitas penyelesaian permohonan eksekusi dan interkoneksi sistem	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Komitmen dengan percepatan penyelesaian permohonan eksekusi dan interkoneksi sistem	Biaya Perkara

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				TARGET			
						I	II	III	IV
5.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)				72	72	72	72
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				95	95	95	95
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)				3.0	3.0	3.0	3.0
		Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)				90	90	90	90

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
INDIKATOR KINERJA : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)									
1	Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara dengan menerapkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin sesuai Perka BKN RI Nomor 8 Tahun 2019	✓	✓	✓	✓	Sertifikat/ Kompetensi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	-
2	Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021	✓	✓	✓	✓	Hospitalitas	Program Dukungan Manajemen	Aparatur yang berkinerja tinggi	-
3	Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja baik sedang sanksi hukuman bagi pegawai yang tidak berkinerja baik	✓	✓	✓	✓	Kinerja	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan kinerja aparatur sipil negara	-
INDIKATOR KINERJA : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)									
1	Mengelola keuangan negara baik DIPA 01 dan DIPA 04 dengan baik dan benar sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2024	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Mengelola keuangan negara secara terencana dan terukur	3.298.727000 DIPA TA. 2024
2	Merencanakan serapan anggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Perencanaan keuangan negara yang baik dan benar	3.298.727000 DIPA TA. 2024

INDIKATOR KINERJA : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)									
1	Menatausahakan dan mengelola barang milik negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 127/KM.6/2022	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Tata kelola barang milik negara dengan baik	-
2	Menatausahakan administrasi pengelolaan hibah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2022	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Tata kelola hibah sesuai ketentuan yang berlaku	-
3	Mengelola barang milik negara sesuai siklusnya mulai perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, pemindahtangan dan pemusnahan, penghapusan	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Menjalankan siklus barang milik negara sesuai ketentuan	1.343.315.000 DIPATA. 2024
INDIKATOR KINERJA : Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)									
1	Menyediakan kualitas pelayanan informasi publik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap website dan portal PPID Pengadilan Agama Bontang sesuai SK SEKMA Nomor 631/SEK/SK/VII/2023	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Layanan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan	3.000.000 DIPATA. 2024
2	Menyiapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas sesuai dengan SK SEKMA Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 dan evaluasinya secara berkala sesuai dengan SK SEKMA Nomor 288/KM.6/2022	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Mencapai sasaran indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya sebagaimana ditetapkan	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
6.	Penguatan Pengawasan terhadap kinerja pengadilan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja Pengadilan Secara Optimal	100	100	100	100

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
INDIKATOR KINERJA : Persentase Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja Pengadilan Secara Optimal									
1	Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur peradilan	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur peradilan	-
2	Membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan, kemudian memuatnya di dalam Aplikasi Kinsatker, Aplikasi Wastitama dan Aplikasi E-Binwas	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
7.	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	90	90	90	90

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
INDIKATOR KINERJA : Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi									
1	Melakukan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi secara berkelanjutan sesuai ketentuan Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021	✓	✓	✓	✓	Laporan	Program Dukungan Manajemen	Melakukan kampanye anti korupsi melalui sarana teknologi informasi dan memperkuat survei persepsi anti korupsi	-

2	Memenuhi <i>evidence</i> pembangunan zona integritas sesuai dengan lembar kerja evaluasi zona integritas	✓	✓	✓	✓	LKE	Program Dukungan Manajemen	Setiap <i>evidence</i> harus dipenuhi	-
---	--	---	---	---	---	-----	----------------------------	---------------------------------------	---

Bontang, 02 Januari 2025

Ketua



*[Handwritten Signature]*  
 Nor Hasanuddin, Lc., M.A  
 NIP. 197804052009121001